



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**SKRIPSI TERAPAN**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 – 2024**



Disusun oleh :

**Ainiah Citra Arizky / 2104421003**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**SKRIPSI TERAPAN**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 – 2024**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik  
Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun oleh :

**Ainiah Citra Arizky / 2104421003**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2025**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainiah Citra Arizky

NIM : 2104421003

Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 30 Juni 2025



Ainiah Citra Arizky

NIM. 2104421003

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ainiah Citra Arizky

NIM : 2104421003

Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Manajemen pada Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.”

### DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M. (  )

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. (  )

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Selma Warsini, S.E., M.M.

404151990032002

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ainiah Citra Arizky  
NIM : 2104421003  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Keuangan dan Perbankan  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.  
NIP. 197509301999032001

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Diketahui Oleh  
Ketua Program Studi  
D4 Keuangan dan Perbankan

Heri Abrianto, S.E, M.M.  
NIP. 196510051997021001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan di Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).
3. Bapak Heri Abrianto, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan PNJ.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan sangat baik telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, terkhusus dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga terutama orang tua penulis, umi dan bapak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga saat ini, selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta senantiasa mendoakan yang terbaik dalam setiap langkah yang dijalani

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

oleh penulis. Tak lupa, kepada adik penulis yang senantiasa menghibur di saat suka maupun duka.

8. Teman-teman seperjuangan, Farabi, Pandawa Corp, teman seperbimbingan Ibu Lia, dan teman-teman BKT 8A yang selalu memberikan dukungan, membantu, dan menjadi tempat bertukar pikiran selama menjalani perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih skripsi ini masih belum tersusun dengan sempurna. Oleh karena itu, penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca di kemudian hari.

Depok, 06 Juni 2025

Ainiah Citra Arizky

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainiah Citra Arizky  
NIM : 2104421003  
Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 – 2024”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Yang menyatakan

Ainiah Citra Arizky



Ainiah Citra Arizky

Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan

**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hampir setiap tahunnya selama periode 2020-2024, namun di sisi lain ternyata tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Pemerintah Pusat masih dalam kategori tinggi dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak daerah, serta realisasi PAD tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rata-rata PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan berturut-turut sebesar 113,81%, 113,33%, dan 115,38% yang tergolong sangat efektif. Sementara itu, kontribusi PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan terhadap PAD pada tahun 2020-2024 masing-masing sebesar 6,46%, 0,63%, dan 1,73%, termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui sosialisasi, pengawasan, dan pendekatan kepada wajib pajak.

**Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Asli Daerah**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Ainiah Citra Arizky

*Bachelor of Applied Finance and Banking*

*Analysis of the Effectiveness and Contribution of Taxes on Certain Goods and Services (PBJT) to Local Revenue (PAD) in Bogor Regency from 2020 to 2024*

**ABSTRACT**

*This study is motivated by the increase in the realization of revenue from the Specific Goods and Services Tax (PBJT) almost every year during the period 2020-2024. However, on the other hand, it turns out that the level of dependence of the Bogor Regency Government on the Central Government is still high in financing its regional expenditures. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness and contribution of the Specific Goods and Services Tax (PBJT), particularly the PBJT on food and/or beverages, parking services, and arts and entertainment services, to the Local Government Revenue (PAD) of Bogor Regency for the years 2020-2024. This study uses secondary data in the form of targets and actual local tax revenue, as well as actual PAD for the years 2020-2024. This study employs a descriptive quantitative approach. Data collection methods include documentation, literature review, and interviews. The analysis technique used is descriptive statistics, involving calculations using the effectiveness and contribution ratio formulas. The results of the study indicate that the average effectiveness rate of PBJT on food and/or beverages, parking services, and arts and entertainment services is 113.81%, 113.33%, and 115.38%, respectively, which is classified as highly effective. Meanwhile, the contribution of PBJT on food and/or beverages, parking services, and arts and entertainment services to PAD in 2020-2024 was 6.46%, 0.63%, and 1.73%, respectively, which is classified as very low contribution to PAD in Bogor Regency. The Bogor Regency Government consistently strives to increase local tax revenue through public awareness campaigns, oversight, and outreach to taxpayers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Local Taxes, Taxes on Certain Goods and Services, Local Revenue*

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
2.3 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Objek Penelitian .....	37
3.3 Metode Pengambilan Sampel .....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	40
3.6 Metode Analisis Data .....	41

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.2 Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Tiga Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023 .....	6
Tabel 1. 2 Tingkat Kenaikan/Penurunan Realisasi Penerimaan Tiga Jenis PBJT di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023 .....	6
Tabel 2. 1 Tarif PBB-P2 Kabupaten Bogor .....	14
Tabel 2. 2 Tarif PBJT atas Tenaga Listrik Kabupaten Bogor.....	15
Tabel 2. 3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas Pajak Daerah .....	23
Tabel 2. 4 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah .....	24
Tabel 3. 1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas Pajak Daerah .....	42
Tabel 3. 2 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah .....	43
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	52
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	53
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	55
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan PBJT atas Jasa Parkir Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	56
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	57
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	60
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	61
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	63
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Efektivitas Tiga Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	65
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Kontribusi Tiga Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	68

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bappenda Kabupaten Bogor .....	46
Gambar 4. 2 Grafik Rasio Efektivitas PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	55
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Efektivitas PBJT atas Jasa Parkir Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	57
Gambar 4. 4 Grafik Rasio Efektivitas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	58
Gambar 4. 5 Grafik Rasio Kontribusi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	61
Gambar 4. 6 Grafik Rasio Kontribusi PBJT atas Jasa Parkir Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	62
Gambar 4. 7 Grafik Rasio Kontribusi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024.....	64
Gambar 4. 8 Grafik Rekapitulasi Efektivitas Tiga Jenis PBJT Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	66
Gambar 4. 9 Grafik Rekapitulasi Kontribusi Tiga Jenis PBJT Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian ke Bappenda Kabupaten Bogor .....	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Bogor...	83
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Bogor	84
Lampiran 4 Data PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024...	85
Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappenda Kabupaten Bogor .....	86
Lampiran 6 Dokumentasi Bersama Narasumber .....	99



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi, Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengatur pemerintahan di tingkat daerahnya sendiri (Ismail, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan peningkatan penyelenggaraan efisiensi dan efektivitas administrasi pada semua jenjang pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun mengingat kondisi yang berbeda di setiap daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing (Guntoro, 2021).

Pendapatan daerah berasal dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur keuangan daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang diizinkan oleh undang-



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

undang. Sedangkan, pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah, dan setiap peningkatan pajak daerah akan berpengaruh pada bertambahnya pendapatan asli daerah. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah, yaitu jika penerimaan pajak daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan (Usman, n.d.).

Berdasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dikenakan oleh undang-undang kepada perseorangan atau kelompok yang sifatnya memaksa, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat daerah tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak daerah sebagai komponen utama PAD dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota terbagi dalam beberapa jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.427.068 jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Kabupaten Bogor secara administratif terdiri dari 434 desa/kelurahan (417 desa dan 17 kecamatan), dengan total 3.941 RW dan 15.874 RT yang tersebar di 40 kecamatan (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2024).

Menurut Rachmandini dan Ekowati (2023), Kabupaten bogor menjadi pintu gerbang ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat. Kabupaten Bogor dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang berkembang pesat memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar melalui sektor pajak, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sementara itu, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBJT menggantikan lima jenis pajak daerah yang sebelumnya terpisah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur pajak daerah dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, karena potensi pajak dari ketiga jenis pajak ini cukup besar mengingat tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Bogor. Sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata, restoran, lahan parkir, dan tempat hiburan, sektor ini menjadi sumber pendapatan potensial bagi pemerintah daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan untuk mendanai pembangunan dan pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penggalan sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu bagian dari PAD adalah belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Tampaknya daerah masih belum mempercayai pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendanaan desentralisasi (Pesik, Saerang, dan Manossoh, 2020). Alfajar dan Masjono (2022) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor masih sangat bergantung pada sisa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, perlu untuk menilai kontribusi masing-masing sumber PAD khususnya pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan dan efektivitas tujuan perencanaan dalam mencapainya untuk memastikan kapasitas keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah (Pesik, Saerang, dan Manossoh, 2020).

Efektivitas dalam pemungutan pajak merupakan usaha untuk mengoptimalkan potensi yang sudah ada atau menemukan sumber-sumber baru yang dapat

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dikenakan pajak (Lovianna dan Rahmi, 2022). Menurut Talondong, Morasa, dan Tangkuman (2018), efektivitas pajak daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas tersebut menunjukkan sejauh mana realisasi penerimaan pajak daerah dapat memenuhi sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas menunjukkan penerimaan pajak yang besar dan kinerja yang semakin baik. Lalu hasil dari efektivitas pemungutan akan dapat diketahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cara untuk mengukur kontribusi pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan pajak terhadap PAD (Juwita dan Hidayatulloh, 2024). Tingkat kontribusi dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya jenis pajak daerah tersebut pada PAD.

Penelitian mengenai PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan yang dahulu bernama pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan sudah banyak dilakukan. Namun dalam penelitian tersebut masih terdapat ketidakonsistenan hasil penelitian. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Ishak (2023) mengenai Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara individu maupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lukypa, Manan, dan Sujadi (2023) juga menjelaskan bahwa kontribusi sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap PAD termasuk kriteria sangat kurang. Pajak hiburan dan pajak parkir dikategorikan sebagai pajak terbelakang.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Aziz, Susanto, dan Yulia (2024) mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan dan bersamaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat ketidakconsistenan hasil penelitian antar peneliti, hal ini disebabkan oleh perbedaan lokasi dan periode yang menjadi fokus penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Ishak (2023), Lukypa, Manan, dan Sujadi (2023), dan Aziz, Susanto, dan Yulia (2024) adalah variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen berupa Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, yang kini namanya telah berubah menjadi PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang sangat relevan dengan sektor pariwisata dan ekonomi dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bogor. Selain itu, periode yang dianalisis pada penelitian ini yaitu 2020-2024 dan lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kabupaten Bogor, sebuah wilayah dengan potensi pariwisata dan ekonomi yang berkembang pesat, yang menjadikannya studi kasus yang menarik untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

Mengingat potensi pajak dari PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, serta PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang cukup besar dikarenakan tingginya aktivitas perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Bogor, dalam hal ini pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dari sektor tersebut guna meningkatkan PAD yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, daerah diharapkan lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024”**.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan potensi pariwisata dan ekonomi yang berkembang pesat. Sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata, restoran, tempat parkir, dan tempat hiburan, sektor ini menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah daerah jika dioptimalkan.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Tiga Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023**

Jenis PBJT	Tahun			
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Makanan dan/atau Minuman	124.362.590.156	171.395.867.265	265.576.863.568	312.479.441.263
Jasa Parkir	6.623.826.077	8.903.188.318	14.555.705.447	19.316.928.810
Jasa Kesenian dan Hiburan	31.633.602.318	26.888.507.907	62.643.944.313	78.290.090.188

Sumber: Web Open Data Kab. Bogor (2024)

**Tabel 1. 2 Tingkat Kenaikan/Penurunan Realisasi Penerimaan Tiga Jenis PBJT di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023**

Jenis PBJT	2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	Naik/Turun (Rp)	%	Naik/Turun (Rp)	%	Naik/Turun (Rp)	%
Makanan dan/atau Minuman	47.033.277.109	37,8%	94.180.996.303	54,9%	46.902.577.695	17,7%
Jasa Parkir	2.279.362.241	34,4%	5.652.517.129	63,5%	4.761.223.363	32,7%
Jasa Kesenian dan Hiburan	-4.745.094.411	-15,0%	35.755.436.406	133,0%	15.646.145.875	25,0%

Sumber: Web Open Data Kab. Bogor, 2024 (Data Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan di Kabupaten Bogor selama periode 2020–2023. Secara umum, data menunjukkan tren peningkatan tahunan untuk ketiga jenis pajak ini. Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan di



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Kabupaten Bogor selama periode 2020–2023. Data disajikan dalam bentuk persentase perubahan dan nominal.

PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah yang paling meningkat, diikuti oleh PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, dan PBJT atas jasa parkir. PBJT atas makanan dan/atau minuman terus meningkat setiap tahunnya sebagai hasil dari peningkatan wisata kuliner dan bisnis restoran di Kabupaten Bogor. PBJT atas jasa parkir juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan kebutuhan akan tempat parkir. Sementara itu, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi di sektor terkait telah berkembang secara ekonomi, dan ada potensi besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor.

Menurut website resmi BPK RI (2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada tahun 2021 sebesar Rp3,7 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp3,3 triliun, dengan kelebihan target sebesar Rp417 miliar. Namun pajak daerah nampaknya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan pendapatan daerah, dan pajak daerah masih belum bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi daerah karena menurut Alfajar dan Masjono (2022), ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bogor berada pada tingkat yang tinggi yang berarti Pemerintah Kabupaten Bogor masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai belanja daerahnya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kemandirian dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor dalam membiayai pengeluaran daerahnya dengan melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan seberapa efektifnya target-target perencanaan dengan realisasinya sehingga pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024?
4. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada tahun 2020 – 2024?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, sehingga tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024.
2. Menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024.
3. Menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 – 2024.
4. Menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada tahun 2020 – 2024.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai analisis efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi bahan referensi pada penelitian yang sama atau serupa.

**1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dirancang untuk membantu pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**Bab I: Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah yang menjadi fokus penelitian untuk mendukung topik yang dipilih. Bagian ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat yang menjadi dasar penelitian ini. Serta terdapat sistematika penulisan penelitian yang memberikan gambaran terperinci mengenai isi dari setiap bab penelitian.

**Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan Pustaka berisi penjelasan dari sumber pendapatan daerah, pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, efektivitas, kontribusi, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu.

### Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan terkait prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis, didalamnya tercantum jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan terkait proses pengolahan data dan berisi pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor dengan menggunakan data dan metode yang telah dijabarkan pada bab metode penelitian.”

### Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Setelah mengolah dan menganalisis data secara mendalam menggunakan rumus perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa parkir, serta PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berperan aktif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas dari PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Bogor tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PBJT atas makanan dan/atau minuman berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 113,81%. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, realisasi PBJT atas makanan dan/atau minuman selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBJT atas makanan dan/atau minuman telah dilaksanakan dengan baik dan dinilai mampu menggali potensi dari sektor tersebut. Sementara itu, analisis rasio kontribusi PBJT atas makanan dan/atau minuman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 6,46% yang dikategorikan sangat kurang berkontribusi walaupun adanya tren peningkatan yang signifikan pada realisasi PBJT atas makanan dan/atau minuman dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran mengalami pertumbuhan, potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan PAD Kabupaten Bogor.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas dari PBJT atas jasa parkir di Kabupaten Bogor tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PBJT atas jasa parkir berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 113,33%. Sama halnya dengan PBJT atas makanan dan/atau minuman, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan realisasi PBJT atas jasa parkir selalu mencapai target yang telah

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan PBJT atas jasa parkir telah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, analisis rasio kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,63% yang dikategorikan sangat kurang berkontribusi walaupun adanya tren peningkatan pada realisasi PBJT atas jasa parkir dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor parkir mengalami pertumbuhan, potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan PAD Kabupaten Bogor dalam mendukung keuangan daerahnya.

3. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas dari PBJT atas jasa kesenian dan hiburan di Kabupaten Bogor tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 115,38%. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, realisasi PBJT atas jasa kesenian dan hiburan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dilaksanakan dengan baik dan dinilai mampu menggali potensi dari sektor tersebut. Sementara itu, analisis rasio kontribusi PBJT atas jasa kesenian dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 1,73% yang dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Terjadi peningkatan kontribusi sebesar 3,20% pada tahun 2024 akibat dari pemulihan dan pertumbuhan aktivitas di sektor hiburan, namun kategorinya tetap berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor secara aktif berupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Upaya ini mencakup sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak, penegakan sanksi tegas sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023 mulai dari teguran hingga penyitaan aset untuk memastikan kepatuhan, serta optimalisasi penagihan melalui pendekatan intensifikasi (verifikasi wajib pajak terdaftar) dan ekstensifikasi (identifikasi wajib pajak



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

baru) dengan kolaborasi Kejaksaan. Selain itu, pemerintah juga proaktif memantau dan mendekati entitas usaha yang memenuhi kriteria agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memastikan semua potensi penerimaan dapat teridentifikasi dan tergali secara optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan peraturan pajak yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sosialisasi harus lebih dari sekadar memberikan informasi dan kembangkan program edukasi yang *targetted* sesuai jenis wajib pajak dan gunakan metode yang inovatif misalnya, seminar *online*, *workshop*, atau konten edukasi di media sosial.
2. Pemerintah daerah perlu meninjau langsung entitas yang dikenai pajak, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Mereka juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan menagih kewajiban dari wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.
3. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penentuan dan penetapan target pajak dilakukan secara realistis namun tetap mengacu pada potensi sesungguhnya. Penetapan target didasarkan pada data historis bulanan dan kemampuan penerimaan dari masing-masing objek pajak, dengan prinsip bahwa target harus berada di bawah potensi maksimal yang dimiliki.
4. Untuk riset selanjutnya, disarankan agar peneliti mengidentifikasi jenis pajak daerah yang belum tergarap maksimal di lokasi terpilih, sekaligus mengubah sasaran atau fokus studi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfajar, A., & Masjono, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 2-9.
- Alfiani, N., Dali, R. M., & Syukur, R. A. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *eCo-Buss*, 6, 1105-1110.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14, 251-260.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Azis, N. F., Susanto, H., & Yulia, I. A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 1312-1323.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. (2024, November 2024). *Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor*. Retrieved from Open Data Bogorkab: <https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/realisasi-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-bogor>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024, June 12). *Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor (jiwa), 2022-2024*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor: <https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgwIzI=/jumlah-penduduk-kabupaten-bogor--jiwa-.html>
- Bappenda Kabupaten Bogor. (2025). *Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor*. Retrieved from bappenda.bogorkab.go.id: <https://bappenda.bogorkab.go.id/struktur-organisasi/>
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO. *JURNAL AKUNTANSI (JA)*, 117-129.
- BPK RI. (2022, March 4). *PAD Kabupaten Bogor 2021 Lampau Target*. Retrieved from BPK RI: <https://jabar.bpk.go.id/pad-kabupaten-bogor-2021-lampau-target/>

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Christina, Y., & Setya, Y. F. (2023). EVALUASI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017-2021. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN* , 2-6.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2-8.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. (2025, February 25). *Portal Data APBD*. Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id): <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2020&provinsi=10&pemda=03>
- Diskominfo Kabupaten Bogor. (2024, February 6). *Kependudukan*. Retrieved from [bogorkab.go.id](https://bogorkab.go.id): <https://bogorkab.go.id/laman/detail-laman/9d074182-c29d-4fbb-b5bd-aa3f533ed05b>
- Diskominfo Kabupaten Bogor. (2024, February 5). *Pemerintahan*. Retrieved from <https://bogorkab.go.id/laman/detail-laman/24aa9e7f-782c-4bde-93cb-41eb1cd6fba1>: <https://bogorkab.go.id/laman/detail-laman/24aa9e7f-782c-4bde-93cb-41eb1cd6fba1>
- DJPK Kemenkeu RI. (2017). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Etem, G. S., & Wahyudi, A. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 150-160.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO . *FIDUSIA: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 70-83.
- Guntoro, M. (2021, July 31). *DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH*. Retrieved from Cendekia Jaya: <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/184>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ismail, G. (2022). IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 191-197.
- Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR DI



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KABUPATEN BANTUL . *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* , 45-52.

Kabupaten Bogor. (2010). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.*

Kabupaten Bogor. (2010). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.*

Kabupaten Bogor. (2011). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.*

Kabupaten Bogor. (2020). *PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.*

Kabupaten Bogor. (2021). *PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.*

Kabupaten Bogor. (2022). *PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.*

Kabupaten Bogor. (2023). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .*

Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 109-112.

Lukypa, J., Manan, A., & Sujadi. (2023). Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Lombok Utara Tahun 2017-2021. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1.

Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal Ganeshwara*, 2-14.

Nabilah, L., Suryani, N., Qadri, R., & Ilham, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, 108-115.

- Nariswari, L. E., & Muchtolifah. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* , 63-84.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH* .
- Pemerintah Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Pemerintah Indonesia. (2023). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*.
- Pesik, J. A., Saerang, D. P., & Manossoh, H. (2020). ANALISIS TREN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 106-111.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* . Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Qolbiah, L., & Fatimah, H. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 . *Prosiding SNAM PNJ* , 6-10.
- Rachmandini, J., & Ekowati, L. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi PBB P-2 di Era New Normal pada Bappenda Kabupaten Bogor. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 3, 2-6.
- Samosir, M. S. (2020). ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIKKA. *Journal of Public Administration and Government*, II, 37-43.
- Setyanto, E., Komariah, R., & Handayani, R. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 572-575.

Tumanduk, L. R., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2021). SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI BPPRD DI KOTA BITUNG. *Jurnal EMBA*, 886-887.

Usman, R. (n.d.). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *journals.telkomuniversity.ac.id*, 6-7.

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah . *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* , 18-19.

Yunizha, V. (2024, June 21). *Mengenal Struktur Organisasi Perusahaan dan 9 Contohnya*. Retrieved from Ruang Kerja: <https://www.ruangkerja.id/blog/struktur-organisasi-perusahaan>

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian ke Bappenda Kabupaten Bogor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor: 737/PL3/ PK.01.09/2025

15 Januari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor  
Jl. Tegar Beriman No. 1, Pakansari  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor  
Jawa Barat 16914

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentang "Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024"

Berikut adalah nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Progam Studi	No. Telepon
1.	Ainiah Citra Arizky	2104421003	D4 Keuangan dan Perbankan	089655681976

Adapun rencana pelaksanaan penelitian/observasi pada Maret s.d Juni 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: [akuntansi@pnj.ac.id](mailto:akuntansi@pnj.ac.id).

Berikut data yang sekiranya akan dibutuhkan, antara lain:

1. Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor
2. Ketentuan Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor
3. Target dan realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan Tahun 2020 – 2024
4. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  
u.b.  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP 196404151990032002

Tembusan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Kabag. Keuangan dan Umum;
4. Kasubbag. Umum Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Bogor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor: 735/PL.3/ PK.01.09/2025

14 Januari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor  
Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 41  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor  
Jawa Barat 16914

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyusunan penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentang **“Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2024”**

Berikut adalah nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Progam Studi	No. Telepon
1.	Ainia Citra Arizky	2104421003	D4 Keuangan dan Perbankan	089655681976

Adapun rencana pelaksanaan penelitian/observasi pada Maret s.d Juni 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: [akuntansi@pnj.ac.id](mailto:akuntansi@pnj.ac.id).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Ari Kusriani



a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  
u.b.  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP 196404151990032002

Tembusan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Kabag. Keuangan dan Umum;
4. Kasubag. Umum Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Bogor



### PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914  
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : [kesbangpolbogor09@gmail.com](mailto:kesbangpolbogor09@gmail.com), Web : [bakesbangpol.bogorkab.go.id](http://bakesbangpol.bogorkab.go.id)

Cibinong, 13 Februari 2025

Nomor : 000.9.2 / 97 - Wasnas  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth.  
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor  
di  
Cibinong

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menimbang :  
Surat Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Nomor : 735/PL3/PK.01.09/2025 Tanggal 14 Januari 2025, Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama Peneliti : **AINIAH CITRA ARIZKY**  
Alamat Peneliti : Kp. Utan Rt. 003 Rw. 007 Kel/Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang  
Judul Perguruan Tinggi : Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)  
Penanggung Jawab : **Dr. SABAR WARSINI, S.E., M.M.**  
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang  
Waktu Penelitian : 17 Februari 2025 s.d 17 Mei 2025  
Tempat Penelitian : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Kepala Badan,  
Hen Risnandar

Terbusan :  
1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);  
2. Yth. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

**Lampiran 4 Data PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024**

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI								
	PAD	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	3.291.322.687.957	3.761.911.243.274	3.739.093.754.030	3.736.339.670.708	3.954.104.214.860	4.034.729.040.778	4.426.280.655.015	4.932.997.163.815
1	PAJAK DAERAH	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	2.090.578.509.000	2.455.982.013.967	2.369.772.820.000	2.595.242.368.968	2.611.901.892.500	2.805.983.839.344	2.890.535.400.000	3.163.551.550.958
2	RETRIBUSI DAERAH	130.262.331.434	128.914.969.533	137.901.142.404	126.416.502.513	153.751.721.189	93.889.999.876	150.946.077.560	125.780.223.025	1.103.452.722.060	1.163.974.670.663
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	67.887.501.000	67.102.677.276	64.271.727.832	71.303.513.920	74.195.370.019	75.860.020.313	76.280.118.159	76.240.907.549	77.598.507.685	78.261.855.627
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	688.055.814.117	756.725.928.757	998.571.308.721	1.108.209.212.874	1.141.373.842.822	971.347.281.551	1.114.976.126.641	1.026.724.070.860	354.694.025.270	527.209.086.567

NO	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI								
	Pajak Daerah	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	2.090.578.509.000	2.455.982.013.967	2.369.772.820.000	2.595.242.368.968	2.611.901.892.500	2.805.983.839.344	2.890.535.400.000	3.163.551.550.958
1	Pajak Reklame	13.700.000.000	17.640.140.439	15.289.312.000	19.765.466.331	20.001.086.000	23.815.724.410	23.146.383.000	26.558.443.211	28.415.110.000	31.435.658.538
2	Pajak Air Tanah dan Batuan	58.747.447.000	62.742.740.431	63.747.447.000	73.287.598.323	74.062.497.000	76.959.916.968	59.816.719.000	69.651.003.531	65.976.059.194	67.466.837.996
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	106.880.274.000	120.725.032.825	96.441.173.000	123.443.709.581	120.725.032.000	124.722.568.506	117.040.128.000	124.153.363.014	116.004.045.544	122.329.160.171
4	PBB-P2	475.563.511.000	526.068.200.819	552.640.264.000	595.562.996.145	577.704.708.000	596.740.655.104	600.500.000.000	610.268.318.364	650.829.481.441	688.089.397.419
5	BPHTB	478.405.408.000	632.023.140.936	855.046.504.000	1.063.983.902.241	860.728.750.000	972.749.057.358	923.500.788.000	1.039.998.824.837	1.000.227.628.000	1.201.323.264.617
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	443.119.475.000	498.212.521.276	507.413.809.000	579.938.341.346	716.550.747.000	800.254.446.622	887.897.874.500	935.120.935.321	1.029.083.075.821	1.052.907.232.217
a.	Jasa Perhotelan	47.442.844.000	63.149.157.520	65.607.534.000	82.864.873.512	113.392.198.000	125.256.597.344	141.427.929.500	144.102.931.125	366.233.732.000	375.858.620.803
b.	Makanan dan/ atau Minuman	97.572.002.000	124.362.590.156	142.576.560.000	171.458.620.026	230.821.675.000	265.576.863.568	296.068.415.000	312.479.441.263	413.572.579.717	416.710.893.098
c.	Jasa Kesenian dan Hiburan	27.996.935.000	31.633.602.318	18.812.491.000	26.888.507.907	55.116.886.000	62.643.944.313	75.834.984.000	78.290.090.188	151.629.301.000	157.849.158.470
d.	Tenaga Listrik	264.961.331.000	272.443.345.205	272.705.973.000	289.823.151.583	304.206.000.000	332.221.335.950	356.212.800.000	380.931.543.935	13.000.474.104	13.285.253.790
e.	Jasa Parkir	5.146.363.000	6.623.826.077	7.711.251.000	8.903.188.318	13.013.988.000	14.555.705.447	18.353.746.000	19.316.928.810	84.646.989.000	89.203.306.056
7	Opsen P&B										
8	Opsen BBNKB										



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappenda Kabupaten Bogor

Narasumber : Bapak F  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappenda Kab. Bogor  
 Tempat : Kantor Bappenda Kabupaten Bogor  
 Hari/Tgl : 23 April 2025

#### Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan target pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor?

Jawab:

*“Nah ini penentuan target ini memang kalau kita bicara target seharusnya bicara penerimaan sebelumnya. tren penerimaan itu akan terbaca tapi sebenarnya yang benar adalah posisi data, datanya kuat nggak, data kita bicara tentang objek yang ada. ini kan objeknya nih, ini hotel ya ini hotel, jadi kalau kita punya data hotel kuat artinya kita tahu berapa kemampuan tiap hotel. Nah selama ini yang dipakai adalah tren pendapatan, tidak pernah memakai data, jadi berapa penerimaan tahun kemarin, berapa perbulan dan itu yang dipakai terus. Harusnya tidak, yang benar adalah memakai data, berapa data yang kita punya, kemampuan tiap bulan berapa. Kemudian targetnya itu harus dibawa potensi, jadi ada potensi ada target. Bicara potensi adalah bicara potensi sesungguhnya dia akan berapa, artinya kita bisa menghitung satu hotel itu menghasilkan potensi pajak berapa. ini bisa dihitung dari beberapa teori, boleh dia pakai. sebenarnya yang benar, tidak boleh pakai asumsi. Tapi memverifikasi laporan tiap bulan, dia akan ketahuan di masa Januari sampai Februari sampai Maret. Tuh ya, paham ya. Jadi yang benar adalah bicara data dan potensi data. Jadi tiap hotel itu harus ketahuan potensinya berapa, setelah kita mengetahui potensi, kan hotel ada yang lapor nggak bener tapi sebenarnya bener cuman kita kadang-kadang lupa memverifikasi. Di KPP bicaranya adalah ketika kita lapor SPT itu sudah self assessment, hotel juga begitu dia boleh lapor aja, tetapi nanti ada verifikasi yang harus dilakukan terhadap pelaporan karena bicara self assesment dia*

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

akan bayar. Nah oke, ketika dia bayar oke, dia hitungannya kan ada penerimaan laporan tuh kan, tiap hari dia berapa, nah itu yang terkadang lupa memverifikasi, kalau itu sudah jalan maka penentuan target itu gampang. Itu tapi yang dilakukan oleh beberapa Kabupaten, yang saya tahu itu memang tren pendapatan. Tapi kan kita kenal juga pajak MBLB, pajak air tanah, dia nggak bisa ikutin tren pendapatan, ya kan nggak bisa, karena apa? MBLB dan air tanah bicara adalah sumber daya alam. yang tidak boleh dikudik/dikeruk semena-mena, nggak boleh. maka ada izin, ketika izinnya tidak terbit maka trennya akan turun, iya karena tergantung izin dari..., nah kalau sekarang bicara ini, ya ya kita akan melihat trennya. ...kemudian pajak parkir harus dibedakan dengan redistribusi parkir, pajak parkir bicara area, redistribusi adalah bicara street jalan. Makanya kadang-kadang masih bingung antara pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak hiburan, pajak hiburan ini nggak terlalu besar, kita pajak restoran ya lumayan ya. Penerimaan kita itu terbesar tuh penerimaan kita itu di dua sebenarnya, hampir semua kabupaten penerimaan terbesar tuh ada dua, PBB-P2 dan BPHTB. Paling besar 55% itu dari situ, sedangkan pajak restoran ini kalau nggak salah nomor 4 atau tiga ya, bentar saya lihat dulu ya laporan produk PBB BPHTB 34%, BPHTB 22%, mbak bicara tentang pajak parkir hanya 0,3% dari penerimaan kami, kemudian pajak atas hotel ya 5,4%, kemudian 12,7 jadi setelah pajak listrik baru kita baca mamin, Oke itu aja ya jadi terkecil lah, kecil saya bilang hotel 5,4 masih ada di atasnya ya, setelah itu baru bicara hotel. Jadi BPHTB, PBB, listrik, setelah itu baru masuk mamin, baru hotel dan parkir itu urutan paling akhir.”

2. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penetapan target pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor?

Jawab:

“Apakah ada faktor? banyak faktor, sekarang aja udah turun semua, ya kan kita di bulan sekarang nih masa pajak Desember masa liburan, pasti penerimaan Januari tinggi, laporannya oke. Kemudian masa kemaren, puasa hotel sepi, mamin juga sepi maka tahun berikutnya dia akan turun



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penerimaannya jadi tidak bisa tahu semua. Karena apa? anda bicara tentang hotel, ya sekarang puncak mungkin kemarin rame, iya orang malas ke puncak itu kan ya. sekarang kedua, kemampuan masyarakat sekarang Indonesia tetapi turun dia tidak akan mengeluarkan yang begini, oke. Jadi banyak faktor, iya banyak faktor. Nah penentuan target ini apakah dipengaruhi oleh cuman kita tentukan target? tidak, ada faktor intern, ada faktor ekstern. Intern ya itu yang dilakukan teman-teman menentukan target sekian dari pendapatan, oke. Ada beberapa cara menghitung dan tiap orang silakan menghitung karena itu bicara asumsi tetapi asumsi itu harusnya berdasarkan data. ini nggak pernah teman-teman, dan beberapa...juga tidak pernah karena memang mengolah data itu susah, oke itu yang pertama. Kemudian ekstern, eksternal contohnya ternyata ada permintaan bahwa kita punya belanja sekian, minus sekian, defisit anggaran kita seperti anggaran negara. Oke ketika anggaran negara defisit dia akan apa? bisa nggak penerimaan dinaikkan? mereka nggak akan bicara data juga kan, karena mereka eksternal nggak punya data. Sudah naikkan aja sekian miliar, itu eksternal. Eksternal contohnya siapa? bisa dari presidennya, bisa dari gubernurnya, bisa dari bupatinya kan gitu, bisa dari DPR-nya, bisa dari DPRD-nya kan gitu kan. Ketika kita karena penentuan anggaran target itu bicaranya tentang satu lingkup Kabupaten, satu lingkup gubernuran. jadi ketika kita sudah menentukan target itu akan dibicarakan dengan Bupati dengan DPRD-nya. kalau mereka nggak sepakat, naikkan, ya sudah naik gitu.”

3. Target pajak yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu tahun anggaran atau tidak?

Jawab:

“Dapat, sangat mungkin. Contohnya kemarin kita pandemi, kita udah baca nih pandemi nih, wah nggak bisa ini tercapai maka kita boleh pak target ini jadi akan tercapai, kita akan ditanya sama faktor eksternalnya. Kenapa nggak tercapai pak? ini pandemi kemampuan kami sekian sekian kan datanya sudah ada. Nah ketika kita menjelaskan itu semua maka boleh kita menurunkan tapi harus ada alasan. Tapi tidak turun aja, seandainya kita mengatakan pak ini



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bisa naik, penerimaan bisa ditarget dari sekian, kita bilang boleh. Jadi bicara target yang mana ada perubahan, APBD perubahan, APBN perubahan, itu tujuannya.”

4. Jika target pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan tidak terpenuhi maka upaya apa yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor?

Jawab:

“Jadi ketika merah ya sudah jangan dipaksa dan itu harus dilaporkan dan ketika itu tidak tercapai saya kemarin udah biarin aja nggak tercapai karena kemarin sudah sudah nggak bisa tinggal merah, targetnya 67 oke ini tiap UPT, UPT itu kantor cabang ya ternyata bulan kemarin sudah 64 bisa terealisasinya, ini target satu tahun ya ini target satu tahun ini sudah tidak tercapai terus merah ya kan ternyata memang tidak tercapai ya sudah tidak tercapai ikhlasin aja sih. Nah jadi kadang-kadang kayak PBB kemarin PBB itu udah di bulan lalu itu udah minus kita itu kita udah mau ngerubah target itu, turun yuk turun ternyata di akhir-akhir kita kan nggak tahu pola WP kan, kata WP kenapa belum bayar tuh kan ada-ada relaksasi 5% potongan 5%, nggak saya lebih utama bayar THR karena itu sanksinya berat, mungkin dia punya kelebihan di akhir akhir bayar semua, tercapai kita nggak bisa nebak itu padahal di dua detik terakhir di kurang dua minggu hampir Lebaran kurang dua minggu itu masih minus, hitungan saya nggak tercapai, ibu itu Kabid-nya juga bilang nggak tercapai tiba-tiba di akhir tercapai, bingung semua. Itulah pola yang tidak bisa dibaca, kenapa bisa tercapai bukan kita nutupin target bukan bukan, makanya kadang-kadang bleng blengnya itu nggak paham tapi ada strategi yang kita kadang-kadang nanya ini gimana sih gitu kan, tapi intinya adalah kita menghitungnya harus benar gitu kita menghitungnya harus benar, ini udah nggak tercapai, ini parkir sama ini udah minus bulan pertama, kedua masih putih, bulan ketiga udah minus nanti kita lihat lagi bulan keempat minus terus tersampaikan ini nggak akan tercapai atau yang kedua klarifikasi UPT diperingatkan ini kenapa tidak lapor, oke saya biasanya tiap bulan ngirim ini, yang hitam hitam kenapa tidak lapor, ini yang hitam hitam ini tidak lapor



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nih, iya ini kenapa tidak lapor tolong ditanya, yang orange kenapa dia lambat terlambat ini udah denda satu juta loh ya jadi kita kalau enak bermain data enak kalau kita bisa ngolah data enak tapi kalau kita bicara kan ini harus sekikan tapi kita nggak pegang data, udah lah pusing kita jadi kita hanya bisa bantu jadi tiap bulan kan itu ada pembayaran kita nggak tahu itu kenapa, ini nggak kenapa ini turun, kenapa dia lapor kenapa terlambat, nah itu yang tersampaikan. Itulah masuk hubungan antara wajib pajak dan subjek bahwa mereka bukan subjek, subjek...terus bukan mereka rekan, ya kan kenapa dia tidak lapor terus, oh ternyata dia mau tutup pak udah nggak sanggup, ya sudah gimana solusinya, bukan saya mau tutup ya udah dibiarin ya tetap nggak boleh. Inilah yang maksudnya me-manage wajib pajak, Bahasa me-manage wajib pajak bukan minta langsung coba harus bayar itu makanya kemarin saya ketemu di XYZ itu dikeluarin golok pak O, ya iyalah orang dia buka warung untuk hidup saya bilang artinya saya buka warung itu buat makan sehari-hari bukan mencari keuntungan, bedakan itu saya bilang. Hotel kan juga begitu ada hotel yang banyak nggak lapor, ditanya kenapa nggak lapor, kalau memang mereka sudah tidak men-, contohnya villa di puncak ternyata mereka sudah tidak ada yang nginep ya sudah laporkan, secara omset udah nggak masuk ya sudah saya bilang gitu. Dikiranya kita juga dikira ini nyusun targetnya akal-akalan, nggak juga, tahun kemarin kita ke pandemi itu turun dua pajak, MBLB turun, air tanah turun, ya sudah kita akui turun, PBB turun semua turun tapi tersampaikan, kenapa turun ya karena memang kondisinya ini kan sudah mulai turun mereka kaget semua, listrik udah turun padahal kan listrik turun, kenapa listrik turun lah kemarin bayarnya 50%. Kan kita tahunya pokoknya terima nggak tahu proses di dalamnya ruwetnya setengah mati tapi secara potensi memang banyak yang maaf belum jadi wajib pajak karena memang susah harusnya dicari solusinya gimana caranya. Jadi ketika kita sulit menjadi wajib pajak kan ada teman-teman di DPR yang bisa bantu, ada teman-teman perizinan bisa bantu tapi jangan hanya ngomong, tertulis semuanya harus ketika dia menjadi wajib pajak tanda tangan bersedia kalau nggak bersedia alasannya apa, dibimbing terus, begitulah kondisinya”



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Apakah terdapat perbedaan saat pandemi dan setelah pandemi dalam menetapkan target ketiga pajak tersebut?

Jawab:

*“Jangankan pandemi, sekarang aja sudah beda ya kan. Contohnya penerimaan listrik kemarin ada potongan 50% itu harus diperhitungkan. Oke sekarang kemampuan masyarakat turun kan, oke ketika kemampuan masyarakat turun kita nggak bisa kemampuan masyarakat turun kan harus dilihat faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana datanya, ternyata data bulan April langsung anjlok semua. Jadi semua berpengaruh bukan pandemi tapi kondisi ekonomi, kondisi kestabilan negara itu berpengaruh ya oke.”*

6. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor?

Jawab:

*“Kalau pemungutan ini memang mekanismenya adalah wajib pajak membayar secara online self assessment, dia datang ke sini melaporkan pak, pertama melaporkan setelah lapor dia akan berbayar. Itu batas waktunya tanggal 10 melapor, batas membayar tanggal 15 melapor. Setelah itu ketika dia masuk ke lapor dia harus menampilkan dasar perhitungan, tetapi tidak semua wajib pajak memahami itu kan. Kalau yang besar besar hotel-hotel besar bintang 4 5 punya pembukuan, kalau namanya wisma villa mereka rata-rata pribadi dan dia tidak punya pembukuan ya kan. Jadi perhitungan wajib pajak diserahkan ke wajib pajak, jadi wajib pajak melapor berdasarkan laporan keuangan saya-saya terimanya 40 juta per bulan maka 10 persen itu 4 juta adalah pajak, sebenarnya tidak dibebankan ke owner, tidak. Mamin itu 10% dibayar oleh konsumen ya kan penambahan 10% cuma di masyarakat tidak pernah begitu hanya sebagian, mereka udahlah bayar sekian nanti langsung potong 10% itu nggak boleh jadi seharusnya bon atau bill itu nanti mencantumkan berapa dia berbayar pajaknya berapa, kalau itu terjadi masyarakat paham. Tetapi kalau kita beli bakso nggak loh sekian pak, ya kan nggak kan nggak boleh nah ini mendekati masyarakat seperti itu ya kan. Yang kedua karena dititipkan ke wajib pajak maka belum tentu yang 10% itu dibayar ya, tapi intinya adalah*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

silakan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya sama dengan...kemudian membayar sesuai aturan oke. Terus pak mekanisme aja? kan ada verifikasi, kalau verifikasi ternyata ditemukan kebohongan atau ketidaksesuaian laporan maka ada pemeriksaan, di pemeriksaan itu akan dikeluarkan surat tagihan lagi. Pak apa aja pajak yang lapor, yang tidak lapor banyak? banyak, rata-rata 10% yang tidak lapor, ketika dia tidak lapor pasti dia tidak membayar nah itu yang belum sampai ke sanksinya, paling disegel dikasih stiker gitu aja. Jadi stiker bahwa ini tidak melakukan pembayaran atas pajak restoran atau pajak makan minum sekarang bahasanya, kemudian hotel juga ditempel di belakangnya tidak melakukan pembayaran atas gitu. Parkir juga gitu, semua PBJT itu sebenarnya dibebankan ke konsumen bukan ke wajib pajak cuma kadang-kadang wajib pajak pusing mengerjakan itu semua. Inilah sosialisasi yang harus dilakukan ya.”

7. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor?

Jawab:

“Ah ini sudah nih, parkir itu ya udahlah kondisinya pasti kondisi masyarakat, pasti itu. Kalau parkir nggak ada pengaruhnya sih cuman banyak parkir liar yang oke, parkir liar yang dikuasai oleh maaf oknum tertentu dan itu yang tidak bisa dibahas ya kan tuh makanya kata teman-teman agak susah nih parkir karena berkaitan dengan ini masih kemarin masih bingung antara parkir dan redistribusi tapi parkir nanti kebanyakan nanti kita pelan-pelan, kalau yang pengen kan bangsa secure yang itu itu besar aja sebulan tuh bisa 20.000.000 bisa, tapi yang yang yang belum begitu yang manajemennya masih kacau, nggak bisa itu oke. Jadi kalau bicara Kabupatenn Bogor jujur potensinya lebih dari itu kalau kita mau, cuman memang bukan kesadaran yang minim juga teman-teman merasakan apa dari pembayaran pajak itu kan gitu, saya kalau ketemu teman-teman di mana Pancawati pak O boleh deh pajak hiburan di hotel dinaikkan terus bangun jalan saya baru saya mau ya kan itu persoalannya kan tapi kebijakan pembangunan kan ada di tempat lain kan karena kalau kita bicara bicara mau naik potensi pajak maka



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pembangunan itu harus dirasakan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat itu baru benar. Sekarang saya ditarik pajak, jalan saya rusak terus ya orang nanya kan, karena pajak itu tidak memberikan keuntungan secara langsung tapi bagaimana pembangunan itu lebih mengarah ke masyarakat sehingga memberi daya beli masyarakat menambah. Jadi kalau seandainya kita mau bicara pajak hotel oke di puncak ya sudah puncak itu dirapikan, kalau saya datang ke puncak sama saya datang ke Kota Batu saya pilih ke Kota Batu. Coba lewat puncak kumuh kiri kanan iya kan, coba di Kota Batu nggak ada itu warung-warung pinggir jalan, nah sekarang saya punya hotel di sini, di sini orang jualan semua apa untungnya itu ya kan, sekarang kemarin bicara tentang perizinan supaya kalau memang izinnnya nggak boleh sudah selesai ini gembar-gembar akhirnya masyarakat takut ke atas kan, belum lagi yang masyarakat mengarahkan jalan dicekek lah kalau masuk jalan-jalan tikus hampir susah, anda bicara mau meningkatkan PAD daerah tapi orang mau wisata setengah mati, yang kemarin berita lagi booming di mana di Sentul parkir sampai 100.000 gimana ceritanya kan itu, kalau begitu ya nggak jangan bicara yang lain berita ini mau lurus atau enggak gitu aja makanya kemarin pak bupati udah tahu ini puncak pasti turun nih iya karena kondisinya begitu, saya suruh ke puncak aja nggak mau sekarang kan kumuh, iya pedagangnya udah pinggir jalan semua diatur masuk area nggak mau kan repot saya bilang, coba anda datang ke Surabaya kemarin bersih nggak ada pedagang pinggir jalan di mall dimasukkan, Malang juga begitu, mereka akan bicara tentang penataan kota. Sekarang pak Dedi mau begitu ayo gitu. Jadi banyak pengaruh makanya anjlok semua kan makanya langsung disuruh ngitung, hotel turun, semua turun jadi kita mengharapkan intinya adalah bahwa pembangunan itu harus mendukung bagi peningkatan ekonomi sehingga menambah pajak, jangan kita disuruh nambah terus tapi ini nggak dukung, repot. Itu sih kondisinya jadi banyak faktor jadi bukan hanya pandeminya tapi pembangunan kita harus meningkatkan perekonomian masyarakat jadi jalan, contohnya nih contohnya ini bicara Tenjo, Tenjo dulu nggak ada apa-apa kan, Podomoro masuk naik semua, PAD hiburan naik, PAD mamin langsung naik mba ya, naik semua makanya kemarin kenapa penduduk nakal daerah Parung



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Panjang naik lupa kalau Podomoro sudah masuk, jalan sudah dibangun, perekonomian meningkat kan, nah ada masakan rumah makan baru meningkat itu iya tapi swasta yang masuk, bisa nggak kabupaten itu, dulu nggak ada harganya makanya kemarin ya BPHTB juga tiba-tiba melonjak di atas yang lainnya dia digelombang 5 sekarang, bingung kan kita, oh berarti jangan lihat ekonominya karena Podomoro bangun rumah di situ iya, mamin meningkat mamin udah naik makanya bilang naik nih signifikan itulah yang banyak mempengaruhi jangan bicara tentang negatif pandemi itu negatif, enggak jangan bicara itu kita bicara positif, pembangunan boleh lah investasi swasta masuk.”*

8. Apa yang dilakukan pemerintah jika terdapat potensi baru yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak?

Jawab:

*“Jadi kalau seandainya kita menunggu mereka mendaftar itu nggak akan datang, maka teman-teman akan memantau dulu biasanya. Restoran ini secara aturan, secara omset sudah masuk belum sebagai wajib pajak, kalau sudah masuk maka kita akan mendekati bahwa ini seharusnya sudah menjadi wajib pajak, contohnya beberapa rumah makan padang kalau bicara omset sudah masuk tapi susah ditagih karena mereka punya link tapi tidak boleh begitu yang terjadi kalau kita nggak tarik nanti wajib pajak yang ngomong, yang sana aja nggak jadi wajib pajak kok, kok saya? Itu jadi kesadaran wajib pajak, wajib pajak ini kan bukan subjek pajak bukan wajib pajak jadi subjek tuh owner yang menagih dilaporkan wajib pajaknya yang bayar kan konsumen, nah ini kadang-kadang subjek pajaknya yang susah. Jadi kalau kita tapi kalau kayak bangsa mall-mall sudah yang susah itu yang pribumi, ya kemarin saya pernah ke XYZ ada kegiatan disana sama teman-teman XYZ bicara pajak restoran, saya tanya sama teman-teman dari Bappenda X itu kamu nagihnya atas yang maaf ya invest atau pribumi? pribumi, pribumi biasa atau pribumi? yang biasa pak karena nggak ada yang pribumi oke. Sekarang saya buka warung hanya untuk kebutuhan makan, ya nggak usah kamu tagih itu cari penyakit saya bilang gitu, tapi yang invest mie gacoan, KFC ya kan, warteg bahari, itu kan*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*bicara tentang invest itu harus masuk tapi kalau rumah makan kecil hanya untuk hidup sehari-hari ya jangan anda tagih, iya pak O soalnya saya nagihnya kadang-kadang dibawain golok. Iyalah, itu yang terjadi, di kita masih enak makanya banyak pribumi pribumi maaf yang mau buka warung dia dia maju dia nggak mau tapi kalau yang invest kejar dia sampai dapat, kan yang puncak itu invest semua itu nggak ada puncak nggak invest kecuali warung kotak-kotak pinggir jalan itu jangan dibikin itu hanya untuk hidup saya bilang, ini yang kadang-kadang membedakan survey aja dulu yang terlupakan apa, kita bikin dulu form diskusi kan ada pertanyaan dulu kemudian pak ini pertanyaan sudah sesuai, tanda tangan, bapak nggak mau jadi wajib pajak, ya bilang nggak mau alasannya apa, itu nggak pernah dilakukan. Jadi langsung diskusi gini kan nggak enak seharusnya form dulu, perkenalan dulu, anda bersedia jadi wajib pajak atau tidak, kenapa tidak alasannya apa, kan jelas jadi dibawa ke rapat itu jelas tertulis. Ini kalau ngomong nggak mau pak karena ini, selesai rapatnya. Besok tanya lagi, kenapa ini nggak mau, itulah kami harusnya sadar diri bahwa kami juga tidak sebaik itu. Sama dengan pajak hotel sebenarnya wajib pajak itu kalau kita cermat, ini yang terjadi kan kenapa itu nggak mau wajib pajak oh begini-begini, stop ngomong aja kan nggak ada dasar nanti sama DPRD ditanya ini kenapa nggak jadi wajib pajak, kita ngomong lagi kan mereka percaya nggak? nggak kan, coba ada tulisan kenapa nggak mau, dasarnya apa, tanda tangan pak. Ini yang Pemda harus evaluasi.”*

9. Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam memungut pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Jawab:

*“Ya itulah kondisinya ya, pajak hiburan ini ya banyak yang lapor tidak benar tapi tidak menyalahkan wajib pajak, tidak-tidak boleh menyalahkan wajib pajak karena wajib pajak mungkin tidak paham atau memang bandel tapi intinya adalah bagaimana kita menjadi rekan bagi wajib pajak. Jadi intinya begitu seandainya kita rekan artinya begini loh ketika wajib pajak salah ya udah kita benarkan laporannya, harusnya begini bapak-bapak, banyak segini*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ini yang belum bapak ke sana. Ya mungkin di intern kita juga ada yang nggak benar tapi intinya adalah semua self assessment, ketika ditemukan ketidaksesuaian atau kita anggap sudah keluar dari yang seharusnya maka tindakan kita adalah memverifikasi data bukan langsung punishment, nggak ada itu, punishment itu udah tindakan terakhir kita itu. Di KPP juga begitu, kita betulkan, pak ini harusnya bapak laporinya begini, bayarnya sekian. Masih bandel juga ya udah pemeriksaan. Jadi ada tiga rangkaiannya kalau pemeriksaan itu sudah jadi ketetapan tambahan, oke.”

10. Apakah terdapat sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat membayar pajak?

Jawab:

“Ada ini, jadi ada dua sanksi. Bisa sanksi secara yaitu tadi pencabutan izin atas usahanya ada di aturan kita atau yang kedua dia ditagih secara paksa. Ya namanya adanya terakhir itu penagihan secara paksa keluarlah surat paksa, nah ketika sudah surat paksa sampai dengan apa? sampai dengan lelang dan sita, ada jadi bicara penagihan tuh bicaranya adalah bukan dari surat teguran bukan, dari surat paksa setelah surat paksa kita ingatkan masuk ke sita, sita masuk ke lelang, lelang berapa pajak terhutang maka dibayar dulu sisanya baru kewajiban, itu sanksi. Tapi belum dicabut karena bicara tentang hiburan tentang apa tadi parkir tentang hotel kita masih bicara tentang persuasif, kita juga melibatkan kejaksaan untuk menagih. Jadi kita nah ini, optimalisasi ada dua ya itu tadi penagihan ekstens intens, intens itu bicara verifikasi, ekstens bicara wajib pajak yang belum terdaftar, kemudian penagihan bicara tindakan. Itu sebenarnya kuncinya sebenarnya Kabupaten Bogor ini kalau kita bicara pajaknya besar cuman menarik wajib pajak dengan kondisi masyarakat yang masih maaf maaf ya mbak ya orang pribumi tu susah, jadi yang dipandang yang restorannya rame tapi itu orang pribumi dalam penagihannya itu pasti susah. Oke tuh yang bisa saya sampaikan memang kalau bicara ini banyak pertanyaannya tapi menjadi satu ini saya bilang ya. Jadi semua tergantung self assessment ya, kalau saya bicara PPh saya melaporkan pak penghasilan saya sekian, selesai kan, oke nanti diceknya di



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*mana? ketika anda lapor SPT di bulan maret itu diceknya sama teman-teman itulah disamain semua, jadi kemarin ada yang mengatakan harusnya lapor dulu berapa dia harus bayar pajak bikin pembukuan, enggak, di pajak kalau kita bicara self assessment kita silakan bayar sesuai perhitungan kita, nanti di sini kan ada dasar perhitungan. Nah si dari dasar perhitungan lah dilakukan verifikasi, bener nggak? gitu, bukan disamain, ketika hasil ini sama ini ternyata ada laporan perharian yang tidak sesuai maka boleh dilakukan penetapan oleh kita secara jabatan, itulah sistem pajak. Ada juga ada baca di aturan yang Perda 11 ketika dia terlambat melapor sesuai data maka dia kena denda 1.000.000 tiap bulan, jadi saya lapor telat langsung jatuh 1.000.000 setelah itu dihitung ada bunga atas keterlambatan. Jadi terlambat melapor dia kena satu juta, kalau SPT kan cuman dua ratus kalau nggak salah ya, di sini 1.000.000 karena omset kita bicara adalah omset 10.000.000, 10.000.000 10% kan 1.000.000 oke, bahkan dendanya 1.000.000. Nah sekarang terhadap pembayaran di bawah 1.000.000 bagaimana? ya harus diverifikasi kan anda bayar cuma dua ratus, tiga ratus, tinggal dilihat ibu ini memang di bawah satu juta, iya, ya sudah batalkan NPWPD-nya selesai urusannya, pajak itu sederhana karena kitanya ribet.”*

11. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Bogor?

Jawab:

*“Sebenarnya sudah, sudah cuman sosialisasi itu kan contohnya sosialisasi pertama diskus kami yang tidak paham, yang ke-2 wajib pajak memang sudah datang tapi tidak paham juga, sudah sosialisasi sudah semua sosialisasi, jadi ketika Perbup 11 itu mau diberlakukan maka semua wajib pajak sudah diundang sosialisasi. Oke karena yang ngurusin orang akuntansi, yang datang orang teknik, nggak nyambung. Itu kondisinya jadi kadang-kadang orang menggampangkan pajak sebenarnya pajak itu mudah, mudah cuman kadang-kadang akhirnya udah serahkan konsultan padahal konsultan belum juga paham. Jadi sosialisasi sudah cuman ya kadang-kadang kita mau melapor,*

*mau apa, contohnya kita sekarang di teman-teman di Sukamakmur itu banyak restoran-restoran yang sangat sudah di atas omset, oke ketika kita menjadikan wajib pajak, mereka nggak mau karena belum pahamnya bahwa ini datanya ada 10% ditetapkan ke konsumen nah itulah tergantung bonnya sama billnya itu. Kalau mereka nulisnya benar langsung bill padahal bill tuh jelaskan di situ ada kadang-kadang kan muncul lagi charge atas pelayanan. Ya kan lebih besar juga kan harusnya masuk nah ini yang kadang-kadang, tapi kalau sudah yang digital semua itu nggak. Contohnya kayak teman-teman yang wajib pajak wajib pajak kadang-kadang kan banyak yang nakal, bukan mungkin owner-nya udah benar suruh bayar pajak, petugas yang suruh bayar yang bandel kan beda juga. Nah kondisinya ya.”*



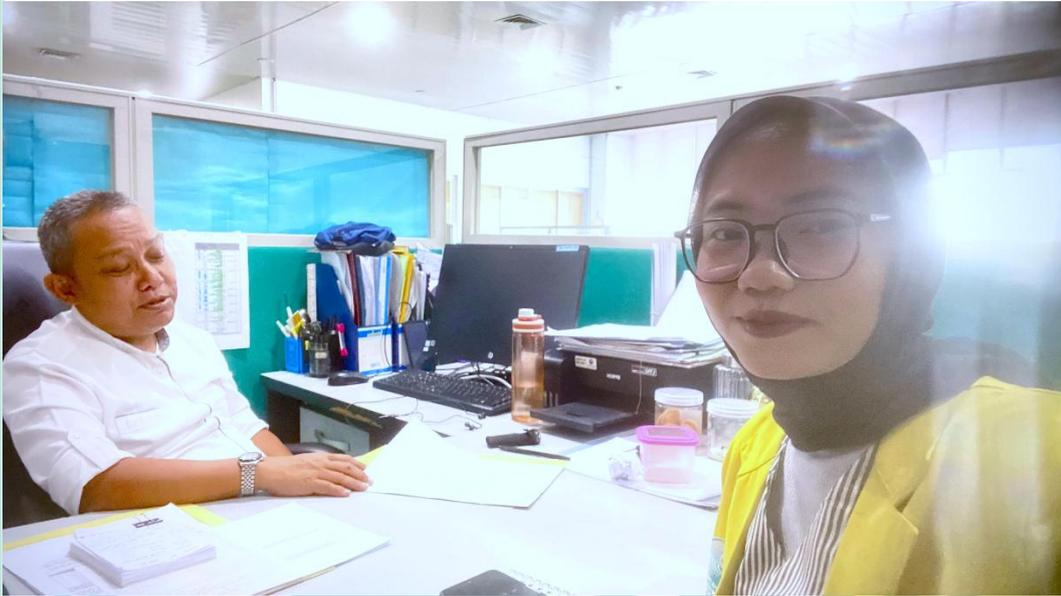
## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 6 Dokumentasi Bersama Narasumber



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA